

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERAWAT DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT.

Arrie Budhiartie

*Fakultas Hukum, Universitas Jambi
Kampus Pinang Masak, Mendalo Darat, Jambi 36361*

Abstrak

Penelitian ingin menelusuri tentang pertanggungjawaban hukum perawat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit. Penelitian ini bersifat yuridis-normatif. Selain itu dilakukan juga penelitian lapangan (*field research*) dengan lokasi di beberapa rumah sakit di Kota Jambi. Adapun pendekatan yang dipakai adalah pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan terhadap kasus (*cases approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kewenangan Perawat dalam menjalankan tugas dan profesinya secara prinsip diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1293/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktek Perawat. Pertanggungjawaban hukum perawat bisa dipilah berdasarkan bidang hukum itu sendiri yakni secara Hukum Administrasi Negara, secara hukum Perdata dan secara Hukum Pidana. Pertanggungjawaban secara HAN akan bersumber dari kewenangan yang diperoleh dan dihubungkan dengan fungsi perawat dalam menjalankan profesinya. Kewenangan atribusi yang melekat pada fungsi independen dimana perawat menjalankan tugasnya berdasarkan kewenangan yang diperolehnya melalui peraturan perundangan-undangan. Pertanggungjawaban secara hukum perdata akan bersumber pada perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Pertanggungjawabannya bisa langsung atau menjadi tanggung gugat bersama dokter/rumahsakit, bergantung pada jenis tindakan yang dilakukan. Sementara pertanggungjawaban secara hukum pidana akan bersumber terhadap persyaratan untuk dapat dimintai pertanggungjawaban hukum; yakni (1) adanya perbuatan/ tidak berbuat yang berdasarkan aturan tertulis (2) adanya kemampuan bertanggung jawab (3) adanya suatu kesalahan, baik sengaja maupun lalai (4) dan tidak ada unsur pemaaf dan unsur pembenar. Bentuk pertanggungjawaban adalah mandiri dan langsung sesuai dengan fungsi sanksi pidana itu nantinya yaitu membuat jera pelakunya.

Kata kunci : Perawat, pertanggung jawaban hukum, rumah sakit

PENDAHULUAN

Perawat sebagai salah satu tenaga medis yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat umum yang tugas utamanya adalah memberikan asuhan atau pelayanan keperawatan sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimilikinya. Pelayanan keperawatan tersebut diberikan secara langsung maupun tidak langsung, melalui kegiatan penyuluhan dan pendidikan oleh perawat dalam institusi sarana kesehatan.

Jika kita membicarakan tugas dan fungsi dari perawat maka kita tidak akan lepas untuk membicarakan peranan perawat dalam pelayanan kesehatan. Pertama peran perawat

adalah sebagai pelaksana, dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana perawat menggunakan metode-metode untuk membantu mengatasi masalah yang dihadapi pasiennya. Kedua peran perawat adalah sebagai pendidik, yang memberikan penyuluhan kepada klien atau pasien yang berada dibawah tanggung jawabnya. Ketiga peran perawat adalah sebagai pengelola, dengan jabatan struktural yang dimiliki guna memantau dan menjamin kualitas asuhan keperawatan. Keempat adalah sebagai peneliti, dalam upayanya untuk mengembangkan *body of knowledge* keperawatan maka perawat harus memiliki

kemampuan untuk melakukan penelitian dibidangnya (Ibid, hal 34)

Dalam menjalankan fungsinya terutama di rumah sakit, perawat mempunyai areal kerja yang berbeda sesuai dengan pembagian unit dalam rumah sakit. Keterbatasan jumlah tenaga medis (dokter) dalam setiap pelaksanaan pelayanan kesehatan telah memaksa dokter untuk membutuhkan perawat sebagai tenaga pendukung dalam setiap tugasnya. Namun tidak jarang dalam pelaksanaan tugasnya tersebut, perawat melakukan kesalahan yang memberikan dampak negatif pada pasien, seperti kesalahan pemberian dosis obat, kesalahan pemberian diet pasien, kesalahan penanganan gawat darurat, kesalahan pelayanan perawatan pasca operasi dan sebagainya. Seperti juga halnya dokter, maka setiap tindakan perawat sebagai suatu subjek hukum akan berhadapan dengan konsekuensi hukum berupa pertanggungjawaban secara hukum pula. Namun hingga saat ini, batasan pertanggungjawaban tersebut masih rancu karena unsur ketidakjelasan kewenangan perawat dalam menjalankan tugas profesinya. Kewenangan yang masih bercampur aduk dengan kewenangan dokter telah mengaburkan makna dan batasan pertanggungjawaban hukum tersebut. Hal ini mengakibatkan kerugian bagi pihak pasien, baik secara fisik, psikis maupun materiil. Dan terlebih lagi, pasien tidak mengetahui tujuan dan sasaran gugatan hukum mereka apabila terjadi tindakan medik yang merugikan pasien. Kesalahan ini pada akhirnya akan mementahkan dalil-dalil gugatan atau tuntutan hukum yang diajukan. Pada akhirnya, masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan tidak mendapatkan suatu kepastian dan perlindungan hukum. Demikian pula dengan pelaku pelayanan kesehatan tersebut seperti dokter, perawat dan rumah sakit sebagai sebuah institusi kesehatan itu sendiri.

Berkaca dari berbagai persoalan hukum yang timbul dalam dunia praktik pelayanan kesehatan di rumah sakit yang melibatkan tugas dan peran perawat dalam kaitannya dengan sistem pertanggungjawaban hukum yang lahir dari setiap tindakan yang dilakukan

tersebut maka penulis tertarik mengangkat permasalahan di atas dengan judul "Pertanggungjawaban Hukum Perawat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit."

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat yuridis-normatif. Namun untuk memudahkan memperoleh bahan-bahan non hukum dan bahan-bahan penunjang lainnya penulis juga melakukan penelitian lapangan (*field research*) dengan lokasi di beberapa rumah sakit di Kota Jambi. Adapun pendekatan yang dipakai adalah pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan terhadap kasus-kasus yang pernah terjadi (*cases approach*), yang dilakukan secara bersamaan dalam upaya memperoleh bahan-bahan hukum terkait objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Kewenangan Perawat dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit

Kewenangan Perawat dalam menjalankan tugas dan profesinya secara prinsip diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1293/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktek Perawat. Keputusan Menteri ini sebagai peraturan teknis yang diamanatkan UU Kesehatan Tahun 1992 dan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan. Dalam PP No. 39 Tahun 1996 tersebut dijabarkan bahwa perawat merupakan salah satu tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan dan fungsi khusus yang berbeda dengan tenaga kesehatan lain. Dengan demikian sebagai peraturan pelaksana, Keputusan Presiden ini merupakan norma yuridis yang mengikat perawat dalam menjalankan profesinya, terutama yang dilakukan di rumah sakit.

Dalam menjalankan profesinya maka perawat tidak akan terlepas dari batasan kewenangan yang dimilikinya. Karena menurut Prof. Leenan seperti yang telah

dikutip dalam bab terdahulu, bahwa kewenangan merupakan syarat utama dalam melakukan suatu tindakan medis.

Pasal 15 Kepmen No. 1293/Menkes/SK/XI/2001 menyebutkan batasan kewenangan tersebut yaitu::

1. melaksanakan asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian, penetapan diagnosa keperawatan, perencanaan, melaksanakan tindakan keperawatan dan evaluasi keperawatan;
2. tindakan perawat sebagaimana dimaksud pada butir a meliputi intervensi keperawatan, observasi keperawatan, pendidikan, dan konseling kesehatan;
3. dalam melaksanakan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud huruf (a) dan (b) harus sesuai dengan standar asuhan keperawatan yang ditetapkan oleh organisasi profesi;
4. pelayanan tindakan medik hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari dokter.

Dalam menjalankan kewenangan tersebut ada kewajiban yang patut diingat oleh perawat. Kewajiban tersebut terdapat dalam Pasal 16 yaitu:

1. menghormati hak pasien;
2. merujuk kasus yang tidak dapat ditangani;
3. menyimpan rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. memberikan informasi;
5. meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan;
6. melakukan catatan perawatan dengan baik.

Meskipun demikian ada pengecualian terhadap kewenangan yang telah dilandaskan pada Pasal 15 tersebut. Pengecualian tersebut jelas dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih luas terhadap penyelenggaraan dan pelayanan kesehatan yang dilakukan seorang perawat. Ketentuan tentang pengecualian tersebut terdapat dalam Pasal 20 yakni:

1. dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa seseorang/pasien, perawat berwenang untuk melakukan pelayanan

kesehatan diluar kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

2. pelayanan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk penyelamatan jiwa.

Pengaturan kewenangan perawat tersebut lebih lanjut dijelaskan dalam Petunjuk Pelaksana Kepmenkes 1239/MENKES/2001 yang merupakan suatu pedoman untuk melaksanakan registrasi praktek keperawatan. Pada petunjuk pelaksanaan tersebut disebutkan bahwa kewenangan perawat adalah melakukan asuhan keperawatan yang meliputi kondisi sehat dan sakit yang mencakup; asuhan keperawatan pada perinatal, asuhan keperawatan pada neonatal, asuhan keperawatan pada anak, asuhan keperawatan pada dewasa, dan asuhan keperawatan pada maternitas.

Pertanggungjawaban hukum perawat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit.

Pertanggungjawaban hukum perawat dapat ditinjau dari pembidangan hukum itu sendiri. Bila ditinjau berdasarkan Hukum Administrasi Negara maka pertanggungjawaban hukum itu akan bersumber pada masalah kewenangan yang dimilikinya. Bila pertanggungjawaban hukum itu berdasarkan hukum perdata maka unsur terkait adalah ada tidaknya suatu perbuatan melawan hukum atau wan prestasi dan bila bersumber pada hukum pidana maka unsurnya adalah ada tidaknya suatu kesalahan terhadap perbuatan yang harus/tidak seharusnya dilakukan berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Berdasarkan kondisi itu penulis akan menguraikannya satu persatu.

Pertanggungjawaban perawat akan bergantung pada bentuk kewenangan yang dimiliki. Pada pelanggaran kewenangan atribusi yang merupakan fungsi independennya perawat maka bila terjadi kesalahan dalam asuhan keperawatan tersebut perawat yang bersangkutan akan memikul beban pertanggungjawabannya sendiri. . Contoh kasus bila seorang perawat melakukan kesalahan ketika memandikan pasien bayi yang menyebabkan terjadinya faktur.

Sementara apabila fungsi interdependen yang dilanggar maka perawat akan memikul beban tanggungjawab tersebut bersama-sama dengan dokter ketua tim dan Rumah Sakit yang memberikan tugas tersebut. Contoh kasus apabila terjadi kesalahan perawat dalam menghitung jumlah kapas bulat di ruang operasi sesudah operasi yang mengakibatkan tertinggalnya kapas di dalam perut pasien tidak terdeteksi oleh dokter.

Untuk kewenangan delegasi sebagai fungsi dependennya maka kesalahan yang terjadi tidak langsung menjadi pertanggungjawaban perawat. Harus diteliti lebih dahulu apakah kesalahan tersebut akibat perintah dokter yang tidak jelas ataukah karena perawat yang tidak mengindahkan perintah tersebut dengan baik. Karena suatu pendelegasian yang dilakukan oleh dokter kepada perawat memiliki beberapa persyaratan seperti yang dikemukakan oleh Wintari Hariningsih (2000) dalam Implementasi Kinerja Perawat di Rumah Sakit yaitu:

1. dalam pelaksanaannya berdasarkan keputusan dokter; ini berarti delegasi tersebut harus definitif
2. dapat melakukan tindakan medik tertentu bila telah terlatih; dalam hal ini seorang perawat yang terlatih karena dia telah menjalani pelatihan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan tidak semua perawat dapat diberi limpahan kewenangan ini.
3. pendelegasian harus tertulis dengan instruksi yang jelas pelaksanaannya serta petunjuk bila timbul komplikasi; disini berlaku bagaimana adanya kewajiban seorang pemberi delegasi (dalam hal ini dokter) untuk memberikan keterangan yang jelas dan perawat mempunyai hak untuk bertanya.
4. harus ada bimbingan dan pengawasan dalam pelaksanaannya; di sini perawat dan dokter menjadi suatu partner bukan bawahan. Dokter membimbing dan mengawasi tindakanyang didelegasikan tersebut.
5. perawat berhak menolak bila ia merasa tidak mampu.

Pertanggungjawaban hukum di bidang perdata akan bersumber pada perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Namun kedua batasan pelanggaran hukum tersebut tetap tidak akan lepas dari pelaksanaan fungsi perawat. Tindakan perawat dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila terpenuhinya unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 1365 KUHPPerdata, yakni adanya kerugian nyata yang diderita sebagai akibat langsung dari perbuatan tersebut. Sementara pertanggungjawaban dalam katagori wanprestasi apabila terpenuhi unsur-unsur wanprestasi dalam Pasal 1234 KUHPPerdata.

Pertanggungjawaban perawat bila dilihat dari ketentuan dalam KUHPPerdata maka dapat dikategorikan ke dalam 4 (empat) prinsip sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban langsung berdasarkan Pasal 1365 BW dan Pasal 1366 BW Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka seorang perawat yang melakukan kesalahan dalam menjalankan fungsi independennya yang mengakibatkan kerugian pada pasien maka ia wajib memikul tanggung jawabnya secara langsung
2. Pertanggungjawaban dengan asas *respondeat superior* atau *let's the master answer* maupun khusus di ruang bedah dengan asas *the captain of ship* melalui Pasal 1367 BW Dalam hal ini pertanggungjawaban akan muncul apabila kesaalahan terjadi dalam menjalankan fungsi interdependen perawat. Sebagai bagian dari tim maupun orang yang bekerja di bawah perintah dokter/rumah sakit, maka perawat akan bersama-sama bertanggung gugat kepada kerugian yang menimpa pasien.
3. Pertanggungjawaban dengan asas **zaakwarneming** berdasarkan Pasal 1354 BW Dalam hal ini konsep pertanggungjawaban terjadi seketika bagi seorang perawat yang berada dalam kondidi tertentu harus melakukan pertolongan darurat dimana tidak ada orang lain yang berkompeten untuk itu. Perlindungan hukum dalam tindakan zaarneming perawat tersebut tertuang

dalam Pasal 20 Kepmenkes tentang Registrasi Perawat. Perawat justru akan dimintai pertanggungjawaban hukum apabila tidak mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan dalam Pasal 20 tersebut.

4. Pertanggungjawaban karena gugatan wanprestasi berdasarkan Pasal 1234 BW. Dalam wanprestasi seorang perawat akan dimintai pertanggungjawaban apabila terpenuhi unsur-unsur wanprestasi yaitu:
 - a. Tidak mengerjakan kewajibannya sama sekali; dalam konteks ini apabila seorang perawat tidak mengerjakan semua tugas sesuai dengan fungsinya, baik fungsi independen, interdependen maupun dependen.
 - b. Mengerjakan kewajiban tetapi terlambat; dalam hal ini apabila kewajiban sesuai fungsi tersebut dilakukan terlambat yang mengakibatkan kerugian pada pasien. Contoh kasus seorang perawat yang tidak membuang kantong urine pasien dengan kateter secara rutin setiap hari. Melainkan 2 hari sekali dengan ditunggu sampai penuh. Tindakan tersebut mengakibatkan pasien mengalami infeksi saluran urine dari kuman yang berasal dari urine yang tidak dibuang.
 - c. Mengerjakan kewajiban tetapi tidak sesuai dengan yang seharusnya; suatu tugas yang dikerjakan asal-asalan. Sebagai contoh seorang perawat yang mengcilkan aliran air infus pasien di malam hari hanya karena tidak mau terganggu istirahatnya.
 - d. Mengerjakan yang seharusnya tidak boleh dilakukan; dalam hal ini apabila seorang perawat melakukan tindakan medis yang tidak mendapat delegasi dari dokter, seperti menyuntik pasien tanpa perintah, melakukan infus padahal dirinya belum terlatih.

Apabila perawat terbukti memenuhi unsure

wanprestasi, maka pertanggungjawaban itu akan dipikul langsung oleh perawat yang bersangkutan.

Sementara dari aspek pertanggungjawaban secara hukum pidana seorang perawat baru dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum ; dalam hal ini apabila perawat melakukan pelayanan kesehatan di luar kewenangan yang tertuang dalam Pasal 15 Kepmenkes.
- b. Mampu bertanggung jawab, dalam hal ini seorang perawat yang memahami konsekuensi dan resiko dari setiap tindakannya dan secara kemampuan, telah mendapat pelatihan dan pendidikan untuk itu. Artinya seorang perawat yang menyadari bahwa tindakannya dapat merugikan pasien.
- c. Adanya kesalahan (*schuld*) berupa kesengajaan (*dolus*) atau karena kealpaan (*culpa*). Kesalahan disini bergantung pada niat (*sengaja*) atau hanya karena lalai. Apabila tindakan tersebut dilakukan karena niat dan ada unsur kesengajaan, maka perawat yang bersangkutan dapat dijerat sebagai pelaku tindak pidana. Sebagai contoh seorang perawat yang dengan sadar dan sengaja memberikan suntikan mematikan kepada pasien yang sudah terminal. (disebut dengan tindakan euthanasia aktif)
- d. Tidak adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf; dalam hal ini tidak ada alasan pemaaf seperti tidak adanya aturan yang mengijinkannya melakukan suatu tindakan, ataupun tidak ada alasan pembenar seperti resiko yang melekat dalam tindakan yang dilakukan. Misalnya resiko terjadinya odem (bengkak) sesudah jarum infus dicabut. Atau adanya rasa tidak nyaman bagi pasien yang menjalani kateter.

Secara umum, pertanggungjawaban pidana seorang perawat adalah mandiri dan langsung, tidak seperti pada perdata maupun HAN. Hal ini dikarenakan fungsi sanksi

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengaturan Kewenangan Perawat Dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit

Kewenangan Perawat dalam menjalankan tugas dan profesinya secara prinsip diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1293/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktek Perawat. Dalam menjalankan profesinya maka perawat tidak akan terlepas dari batasan kewenangan yang dimilikinya. Karena menurut Prof. Leenan seperti yang telah dikutip dalam bab terdahulu, bahwa kewenangan merupakan syarat utama dalam melakukan suatu tindakan medis. Pasal 15 Kepmen No. 1293/Menkes/SK/XI/2001 menyebutkan tentang batasan kewenangan tersebut yaitu :

- a. melaksanakan asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian, penetapan diagnosa keperawatan, perencanaan, melaksanakan tindakan keperawatan dan evaluasi keperawatan
- b. Tindakan perawat sebabaimana dimaksud pada butir a meliputi intervensi keperawatan, observasi keperawatan, pendidikan, dan konseling kesehatan;
- c. Dalam melaksanakan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud huruf (a) dan (b) harus sesuai dengan standar asuhan keperawatan yang ditetapkan oleh organisasi profesi;
- d. Pelayanan tindakan medik hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari dokter.

Pertanggungjawaban hukum Perawat

Pertanggungjawaban hukum perawat bisa dipilah berdasarkan bidang hukum itu sendiri yakni secara Hukum Administrasi Negara, secara hukum Perdata dan secara Hukum Pidana. Pertanggungjawaban secara HAN akan bersumber dari kewenangan yang diperoleh dan dihubungkan dengan fungsi perawat dalam menjalankan profesinya. Kewenangan atribusi yang melekat pada fungsi independen dimana perawat menjalankan tugasnya berdasarkan kewenangan yang diperolehnya melalui peraturan perundangan-undangan. Dan kewenangan atribusi tersebut berdasarkan

asuhan keperawatan (ASKEP). Kewenangan mandat terdapat dalam fungsi interdependent dimana kewenangan perawat diperoleh dalam suatu kerja sama tim. Kewenangan delegasi melekat pada fungsi dependen dimana tindakan yang dilakukan perawat sebenarnya merupakan tanggung jawab dokter, namun tugas tersebut berikut pertanggungjawabannya diserahkan kepada perawat yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Pertanggungjawaban secara hukum perdata akan bersumber pada perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Pertanggungjawabannya bisa langsung atau menjadi tanggung gugat bersama dokter/rumahsakit, bergantung pada jenis tindakan yang dilakukan.

Sementara pertanggungjawaban secara hukum pidana akan bersumber terhadap persyaratan untuk dapat dimintai pertanggungjawaban hukum; yakni (1) adanya perbuatan/ tidak berbuat yang berdasarkan aturan tertulis (2) adanya kemampuan bertanggung jawab (3) adanya suatu kesalahan, baik sengaja maupun lalai (4) dan tidak ada unsur pemaaf dan unsur pembenar. Bentuk pertanggungjawaban adalah mandiri dan langsung sesuai dengan fungsi sanksi pidana itu nantinya yaitu membuat jera pelakunya.

Saran

Untuk lebih memudahkan sistem pertanggungjawaban hukum perawat dan adanya perlindungan hukum yang lebih kuat maka penulis hanya menyarankan agar dibentuk suatu peraturan hukum yang lebih mengikat seperti UU atau Peraturan Pemerintah karena apabila hanya berdasarkan Keputusan Menteri maka aturan itu tidak mempunyai kekuatan mengikat yang kuat. Hendaknya RUU Keperawatan yang saat ini tengah diproses di DPR segera diundangkan menjadi UU.

DAFTAR PUSTAKA

A. Referensi /Literatur

Ann Helm, Malpraktik Keperawatan; 2003, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta

- Chrisdiono M.Achadiat, *Dinamika Etika & Hukum Kedokteran dalam Tantangan Zaman*; 2008, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta
- Danny Wiradharma, *Tindakan Medis Aspek Etis dan Yuridis*; 2003, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta
- Guwandi, *Hukum Medik (Medical Law)*, 2005; Fakultas Kedokteran UI; Jakarta
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*; 2005, Bayumedia Publishing, Surabaya
- Julianus Ake; *Malpraktik dalam Keperawatan*; 2003, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
- Mimin Emi Suhaemi; *Etika Keperawatan, Aplikasi Pada Praktik*; 2003; EGC; Jakarta.
- Nila Ismani, *Etika Keperawatan*; 2001, Widya Medika, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*; 2007, Kencana, Jakarta
- Philiphus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, 1994, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, 2006, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Syahrul Machmud; *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medical Malpractice (Malpraktik Medis)*; 2008; Mandar Maju; Bandung
- Sri Praptianingsih; *Kedudukan Hukum Perawat dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*; 2006, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Wila Chandarawila Supriadi, *Hukum Kedokteran*; 2001, Mandar Maju, Bandung
- Peraturan Perundang-undangan**
1. Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
 2. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktek Perawat

